

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PERCONTOHAN
LAHAN PERTANIAN OLEH UPT-P BALAI LATIHAN
TRANSMIGRASI PEKANBARU DI DESA OKURA
KECAMATAN RUMBAI PESISIR KABUPATEN KOTA
PEKANBARU**



DI SUSUN OLEH :

FRANSISKA OKTAVIANA. N
10975006950

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIALUNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIMRIAU2013**

ABSTRAKSI

IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PERCONTOHAN LAHAN PERTANIAN OLEH UPT-P BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI PEKANBARU DI DESA OKURA KECAMATAN RUMBAI PESISIR KABUPATEN KOTA PEKANBARU

Oleh :

FRANSISKA OKTAVIANA. N

Penelitian ini dilakukan di UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru pada Tanggal 18 Januari sampai 27 Maret 2013. Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru sudah berjalan efektif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 67 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Slovin. Analisa data menggunakan analisis deskriptif. Hasil rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa rata-rata implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru sudah berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa komunikasi berjalan dengan baik, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru sudah baik, kondisi kecenderungan yang terjadi sudah baik dan struktur organisasi UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru juga sudah cukup baik. dikategorikan baik dengan persentase 60,8%.

Kata Kunci: Implementasi Program

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Sang Khalik dan makhluknya, Maharaja dari segala raja. Rabbnya semua alam semesta, Sang Cahaya atas segala cahaya, yang kasih sayangnya melebihi Maryam terhadap Isa. Hanya Dialah yang Wujud, yang Baqo, dan atas perkenan-Nya pula Sezarroh kuasanya ini dinisbikan dari ketiadaan, sebagai pujian, pembelajaran, dan menjadi suatu ruas jalan penghambatan bagi diri ini, seseorang yang baru memulai mencoba mengenali hakikat makhluk pada dirinya, demi untuk mengenal Khalik-Nya.

Syukur Alhamdulillah penulispanjatkankehadirat Allah SWT, karenaatassegalarahmatdanhidayah-Nya,

sehinggapenulisdapatmenyelesaikanpenulisanskripsiini. Skripsiini

berjudul**“IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PERCONTOHAN LAHAN PERTANIAN OLEH UPT-P BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI DI DESA OKURA KECAMATAN RUMBAI PESISIR KABUPATEN KOTA PEKANBARU”**

diajukanuntukmemenuhisalahsatusyaratdalammengikutiujianMunaqasahpadaFaku ItasEkonomi Dan IlmuSosialUniversitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Penulismenyadarisepenuhnyabahwaskripsiinimasihjauhdarikesempurnaan, olehkarenaitukritikdan saran yang membangunangatpenulisharapkan,tentunyadenganmaksudgunapenyempurnaanskripsiini.Sehubungandenganitu, padakesempataninipenulismengucapkanterimakasih yang sebesar-besarnyakepadaberbagaipihak yang

telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M. E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Afrizal, S. Sos, M. Sis. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S. Sos. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Mahmuzar, M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta fikir dan dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Buat Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Hardi Nainggolan dan Ibu Cuci Samroh, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materiil serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-

mudahan perjuangan Bapak dan Ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

6. Pihak instansi-instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini terutama pada Kepala Balai Latihan Transmigrasi yang dikepalai oleh Bapak Tengku Ir. Sofyan Hanafi, M.Si, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Bapak Taswir, S.Sos, dan para pegawai yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Buat keluarga dan Saudara penulis : Abang Rio Ledi Rilius.N, AMd, Adiku Rijki Elviana.N, Adiku Richardo Aulia.N, dan Adiku Nia Angelicha Setiana. Yang telah memberi support dan do'a yang tak henti-hentinya ananda berikan pada kalisa
8. Buat teman-teman seperjuangan penulis, terutama Lokal Cangkatan 2009 Jurusan Administrasi Negara dan Lebai Comunity yang banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, you're all my best friend.

Dan akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagiku semua.

Pekanbaru, 28 Mei 2013
Penulis

Fransiska Oktaviana.N
NIM: 10975006950

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSIH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSIH

PERSEMBAHAN

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan dan penelitian	9
1.4 Kegunaan penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian.....	10
1.6 Sistematika penulisan	10

BAB II : TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian pertanian.....	12
2.2 Kebijakan publik	13
2.3 Pengertian implementasi	15
2.4 Faktor pendukung implementasi kebijakan	16
2.5 Faktor Penghambat implementasi	21
2.6 Perundang-undangan.....	22
2.7 Indikator penelitian	25
2.8 Pandangan islam	29
2.9 Penelitian terdahulu.....	30
2.10 Kerangka berfikir.....	32
2.11 Definisi Konsep	32
2.12 Definisi konsep	34
2.13 Konsep operasional variabel.....	34

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian	35
3.2 Tempat dan waktu penelitian	35
3.3 Jenis dan sumber data	35
3.4 Teknik pengumpulan data	37
3.5 Populasi dan sampel.....	38
3.6 Analisis data.....	39

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah singkat UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Provinsi Riau Pekanbaru	40
4.2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja	41
4.3 Visi dan misi	42
4.4 Uraian tugas bagian	43

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas responden	48
5.1.1 Identitas Responden Menurut Tingkat Usia	48
5.1.2 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin	49
5.1.3 Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan	49
5.1.4 Identitas Responden Menurut Jenis Pekerjaan	50
5.2 Analisis hasil penelitian dan pembahasan	50
5.2.1 Analisis variabel komunikasi	50
5.2.2 Analisis Variabel Sumber Daya	57
5.2.3 Analisis Variabel Kecenderungan	64
5.2.4 Analisis Variabel Struktur Organisasi	70
5.2.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru	76

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Lokasi UPT-P Kabupaten Kota Pekanbaru Binaan Sampai Dengan Tahun 2013 Di Provinsi Riau	4
Tabel I.2	Data Anggaran Dana Pengolahan Hasil Pertanian di Dinas UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Riau- Pekanbaru 2007 – 2012	5
Tabel I.3	Bibit - bibit Unggul yang di tanam Oleh Dinas UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru- Riau Tahun 2007-2013....	6
Tabel I.4	Jenis Alat dan Mesin Pertanian yang ada di UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Tahun 2007-2013.....	7
Tabel II.1	Konsep operasional penelitian	34
Tabel V.1	Identitas Responden menurut tingkat usia	48
Tabel V.2	Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin	49
Tabel V.3	Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan	49
Tabel V.4	Identitas Responden Menurut Jenis Pekerjaan	50
Tabel V.5	Tanggapan Responden Terhadap UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru	51
Tabel V.6	Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu mengadakan sosialisai terhadap kebijakan tentang pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru.	52
Tabel V.7	Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi selalu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat akan pentingnya pertanian.	53
Tabel V.8	Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru sudah memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru	54

Tabel V.9	Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu tepat waktu dan memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru	55
Tabel V.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Hubungan Komunikasi UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru	56
Tabel V.11	Tanggapan Responden mengenai petugas dari UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian sudah mempunyai kualitas yang baik	58
Tabel V.12	Tanggapan Responden alat mesin pertanian sudah cukup lengkap di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru.....	59
Tabel V.13	Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu memberikan pengarahan dalam penggunaan alat mesin pertanian.....	60
Tabel V.14	Tanggapan Responden Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian sudah berjalan dengan baik	61
Tabel V.15	Tanggapan Responden Anggaran yang diberikan melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran	62
Tabel V.16	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Sumber Daya di UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru.....	63
Tabel V.17	Tanggapan Responden mengenai para pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang ditentukan.....	65

Tabel V.18	Tanggapan Responden mengenai Para penggerak swadaya masyarakat selalu memberikan motivasi kepada petani.....	65
Tabel V.19	Tanggapan Responden mengenai Program percontohan lahan pertanian mendapat tanggapan positif terhadap masyarakat transmigrasi di Desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru	66
Tabel V.20	Tanggapan Responden mengenai kerjasama antara UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dengan desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Pelalawa sangat baik	67
Tabel V.21	Tanggapan Responden mengenai UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu melakukan evaluasi pelatihan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru.....	68
Tabel V.22	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Disposisi di UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru.....	69
Tabel V.23	Tanggapan Responden mengenai UPT-P Balaii Latihan Transmigrasi Pekanbaru telah melakukan pengawasan kepada petani dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru	70
Tabel V.24	Tanggapan Responden mengenai UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan pada petani dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian.....	71
Tabel V.25	Tanggapan Responden mengenai Terdapatnya sanksi yang diberikan oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian	72
Tabel V.26	Tanggapan Responden mengenai sanksi yang diberikan UPT-P Balai Latihan Transmigrasi apabila terjadi penyimpangan.....	73

Tabel V.27	Tanggapan Responden mengenai UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru	74
Tabel V.28	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Struktur Organisasi di UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru.....	75
Tabel V.29	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Implementasi program daerah percontohan lahan pertanian oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir	36
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah salah satu isi dari undang-undang dasar 1945 yang sekaligus menjadi faktor penentuan tercapainya tujuan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan berbangsa dalam aspek-aspek ideologi, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, demografi, geografi, dan sumber daya alam.

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke 21 masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun demikian, sejalan dengan tahapan - tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, dengan kata lain kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas.

Dimana kedudukan Balai Latihan Transmigrasi Provinsi Riau di Pekanbaru di bentuk berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.137/MEN/2001 yang di sempurnakan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN-SJ/IV/2011 tanggal 29 April tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi. Balai Latihan Transmigrasi Provinsi Riau adalah UPT-P dibidang Latihan Transmigrasi, merupakan salah satu unit kerja eselon III berada di bawah Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrrasi yang mempunyai wiilayah kerja mencakup seluruh sumatra.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Penyuluhan budidaya tanaman, tentang Pembinaan dan Peran serta Masyarakat. Pemerintah ditugaskan untuk menyelenggarakan penyuluhan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyelenggaraan penyuluhan budidaya tanaman dilaksanakan melalui pemberian informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peran serta masyarakat dalam pemberian pelayanan informasi tersebut, yaitu antara lain: informasi pasar, profil komoditas, penanaman modal, promosi komoditas, dan meteorologi dalam bentuk prakiraan cuaca dan iklim.

Seperti pada UU No. 29 tahun 2009 pasal 13 ayat 1 huruf C Yang dimaksud dengan sarana produksi adalah bahan masukan yang digunakan dalam proses produksi usaha tertentu sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi. Sarana produksi dalam pengertian ayat ini antara lain; untuk usaha pertanian seperti pupuk, benih, pestisida; untuk usaha perikanan seperti kapal dan peralatan tangkap; untuk peternakan seperti ternak besar, ternak unggas, dan pakan ternak; dan lain-lain.

Bekerja sama dengan Penggerak Swadaya Masyarakat di dinas UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru melalui Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru, dalam pemanfaatan lahan kosong sehingga di gunakan sebagai daerah percontohan pertanian ini sebagai pusat pembelajaran oleh penggerak swadaya masyarakat.

Maka perlunya Pengawasan artinya bagi organisasi baik instansi maupun perusahaan swasta, karena dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan maka akan dapat diketahui kesalahan-kesalahan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Dengan demikian diharapkan pegawai atau karyawan waspada atau dapat melaksanakan pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga dengan diadakannya pelaksanaan pengawasan diharapkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sbelumnya dapat tercapai dengan baik.

S.P. Siagian (2004:125) menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari proses pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu makna yang terkandung dalam definisi pengawasan tersebut yaitu pengawasan dilakukan dengan maksud agar tidak adanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan sempurna, serta apabila

pengawasan dilakukan dengan tidak optimal maka berdampak pada hasil yang ingin dicapai, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sulit dalam mencapainya.

Dinas Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Transmigrasi dalam melakukan pelatihan dalam bidang pertanian agar masyarakat transmigrasi mempunyai penghasilan yang mencukupi. Untuk melihat wilayah yang menjadi sasarannya, dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini :

Tabel I.1.
Daftar Lokasi Binaan UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Sampai Dengan Tahun 2013 Di Provinsi Riau

No	Prov	Nama Lokasi UPT	Kecamatan	Kabupaten	Tahun	Jumlah Sekarang	Jenis Trans	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Riau	Kabun	Kabun	Rokan Hulu	2003, 2005 2007, 2008	350 KK / 1520 Jiwa	TU Bun	APBD
		Sengkilo	Kelayang	Indragiri Hulu	2004 - 2005	300 KK / 1393 Jiwa	TU	APBN
		Batu Tetitip II	Sei. Sembilan	Kota Dumai	2007 - 2008	250 KK / 1001 Jiwa	TU	APBN
		Okura	Rumbai	Kota Pekanbaru	2008	50 KK / 200 Jiwa	TU	APBD
		Tiram Jaya	Kuala Indragiri Hilir	Indragiri Hilir	2009, 2010	48 KK / 202 Jiwa	TU	APBD
		Desa Tanjung Melayu			2012	16 KK	TU	APBD
		Lembah Dusun Gading	Tembilahan	Indragiri Hilir	2011	10 KK / 48 Jiwa	TU	APBD
		Rupat	Rupat Utara	Bengkalis	2010, 2011	60 KK / 154 Jiwa	TU	APBN

Sumber : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru

Dapat di lihat dari tabel I.1. adalah daftar lokasi UPT yang menjadi Rencana Kerja Prioritas binaan Kerja bagi Balai Latihan Transmigrasi Propinsi Riau. Kunci keberhasilan pelatihan transmigrasi dimasa depan dipengaruhi oleh adanya partisipasi segenap lapisan masyarakat. Untuk itu perlu dijalin kerjasama yang integral dengan berbagai lembaga, organisasi masyarakat dan dinas instansi terkait agar manfaat pelatihan transmigrasi dapat dinikmati oleh transmigran dan masyarakat pada umumnya.

Tabel 1.2.
Anggaran Dana Pengolahan Hasil Pertanian di Dinas UPT-P Balai
Latihan Transmigrasi Riau- Pekanbaru 2007 – 2012

Program	Kegiatan				% Pencapaian Target	Tahun
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8
Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Melaksanakan hasil pelatihan pengolahan hasil pertanian	Input: Dana Output : Jumlah transmigrasi yang mendapat pelatihan bertambah	122.050.000 30 orang	117.500.000 30 orang	96,27 % 100 %	2007
			286.880.000 30 orang	284.500.000 30 orang	99,17 % 100 %	2008
			243,765,000 270 orang	233,765,000 270 orang	95.90 % 100 %	2009
			247.045.000 90 orang	245.500.000 90 orang	99,37 % 100 %	2010
			175.345.000 60% orang	171.500.000 60 % orang	97,81 % 100%	2011
			98.862.000 30 %	97.750.000 30 %	98.88 % 30 %	2012

Sumber : Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas UPT-P Balai Ltihan Transmigrasi Pekanbaru.

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja

selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Balai latihan Transmigrasi Pekanbaru dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel I.3.
Bibit bibit Unggul yang di tanam Oleh Dinas UPT-P Balai Latihan
Transmigrasi Pekanbaru - Riau Tahun 2007-2013.

Tempat Pelaksanaan	Jenis Tanaman	Keterangan
Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru	- Jagung	
	- Padi	*
	- Kacang-kacangan	*
	- Rumput gajah	
	- Nanas	
	- Rosela	*
	- Buah Naga	*

Keterangan

) Tidak sukses

*) Terlaksana sukses

Sumber : *Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas UPT-P Balai Ltihan Transmigrasi Pekanbaru Tahun 2007-2013.*

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa tanaman yang sukses di tanam ada 3 macam yaitu (jagung, rumput gajah, nanas). Dan yang belum sukses ada 4 macam yaitu (padi, kacang-kacangan, rosela, buah naga). Dikarenakan lahan / tanah gambut yang tidak cocok dengan komoditi tersebut sehingga lahan yang seluas 2 Hektar belum dapat di gunakan secara maksimal oleh para penggerak swadaya masyarakat untuk di buat pelatihan kepada masyarakat transmigrasi, dimana penggerak swadaya masyarakat ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang sudah di tentukan.

Penyuluhan pelatihan, dalam rangka menjalankan ini diperukan penggerak swadaya masyarakat, mengembangkan daerah lahan percontohan pertanian sebagai ajang percontohan penerapan teknologi baru yang yang terkait dalam pertanian.

Tabel 1.4.
Jenis Alat dan Mesin Pertanian yang ada di UPT-P Balai Latihan
Transmigrasi Tahun 2007-2013

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik *	Rusak**	
1	Pompa Air	1	-	1
2	Mobil Worksop	2	-	2
3	Mesin Diesel	1	-	1
4	Mesin Gerinda	1	1	2
5	Dongkrak Hidrolik	1	1	2
6	Pacul	-	2	2
7	Garpu Pacul	2	6	8
8	Traktor Tangan	1	-	1
9	Alat Pengolahan Tanah	1	-	1
10	Penyempurt Mesin (Power Sprayer)	1	-	1
11	Penyempurt Tangan (Hand Sprayer)	-	2	2
12	Alat Perontokan (Thresher Pedal)	1	-	1
13	Alat Pemipil Jagung	1	-	1
14	Alat Penggiling Padi	1	1	1
15	Garpu	-	2	2
16	Mesin potong jerami	1	-	1
Total Keseluruhan		14	16	29

Sumber: Data Olahan Penulis Berdasarkan UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Pada Tahun 2007-2013.

Keterangan

*) Dalam kondisi baik

**) Tidak dapat digunakan lagi (secara ekonomi tidak layak diperbaiki).

Dari data pada tabel tersebut terlihat bahwa ada beberapa jenis alat/mesin Selain itu banyak juga mesin yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian juga terdapat permasalahan yaitu ada beberapa kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan seperti kegiatan pengembangan sumberdaya pertanian di desa Rimbo Panjang dikarenakan kelalaian pihak ketiga.

Dari keterangan diatas diperlukan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik dimana dilakukan pengawasan kinerja agar lahan-lahan yang berpotensi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mencapainya suatu tujuan. Dinas UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru – Riau harus lebih aktif berperan untuk meningkatkan perhatiannya. Pengawasan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui apakah suatu pekerjaan itu berjalan dengan lancar atau tidak dan apabila terdapat kesalahan dapat memperbaikinya segera mungkin.

Atas permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang muncul adalah “Bagaimanakah implementasi daerah percontohan lahan pertanian UPT-P Balai Latihan Transmigrasi dalam rangka untuk menciptakan masyarakat mandiri dan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka hal ini fokus kepada salah satu daerah percontohan lahan pertanian di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik meneliti tentang ***“Implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru”***

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas permasalahan yang berhubungan dengan implementasi percontohan lahan pertanian. Penulis

memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yaitu: ***”Bagaimana implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru ?”***

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya cakrawala keilmuan peneliti.
2. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru
3. Secara akademis, sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang ingin melakukan penelitian terutama untuk meneliti permasalahan yang sama.
4. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.

1.5 Batasan Penelitian

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan luasnya wilayah yang dikelola oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru, maka penulis hanya membatasi wilayah penelitian yaitu di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selain itu penulis juga hanya membatasi pada implementasi Program Daerah Percontohan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian ,Jenis dan

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel serta Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis UPT. Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi Kecamatan Bukit Batu, gambaran umum wilayah, struktur organisasi dan aktifitasnya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penulisan dan pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pertanian

Pertanian atau agriculture berasal dari kata *ager* dan *cultura*. *Ager* artinya tanah, atau ladang, atau lapangan. *Cultura* artinya mengamati, memelihara, membajak. Jadi pertanian artinya cara-cara bercocok tanam (Pertanian dalam arti sempit). Sedangkan pertanian dalam arti luas menurut beberapa ahli ialah : Menurut A T Mosher (1966) Pertanian adalah sejenis proses produksi yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan.

Menurut Kaslan Tohir (1952) Pertanian adalah cabang produksi dimana terdapat perubahan bahan-bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Proses ini bersifat reproduktif yang artinya usaha untuk memperbaharui.

Menurut Minderhoko (1948) Pertanian adalah penggunaan tenaga manusia atas alam dengan tujuan mengarahkan perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berguna bagi manusia sedemikian rupa sehingga akan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Dengan demikian pertanian termasuk suatu jenis usaha yang langsung menghasilkan sampai dapat digunakan untuk keperluan hidup. Secara garis besar pengertian pertanian meliputi :

1. Proses produksi
2. Petani atau pengusaha
3. Tanah tempat usaha

4. Usaha pertanian (Farm Business)

Ilmu pertanian dimulai dari pengalaman bercocok tanam berbagai macam tanaman. Pengalaman ini menghasilkan ilmu-ilmu pertanian yang berupa ilmu terapan. Ilmu pertanian dapat diterangkan menggunakan ilmu-ilmu dasar seperti biologi, kimia, fisika, matematika, ekonomi, sosial dll. Ilmu-ilmu dasar tersebut dapat menjelaskan semua proses yang terjadi dalam bidang pertanian, sehingga ilmu pertanian mencakup ilmu tanah, tata air, cuaca dan iklim, fisiologi, biokimia pertanian, ekologi pertanian dll. Jadi ilmu pertanian merupakan pengetahuan tentang budidaya tanaman dan hewan yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang tinggi dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kesejahteraan hidup manusia.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut **Chandler dan Plano** adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. (Pasalong Harbani : 2008:38).

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh **William N. Dunn** mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. (Pasalong Harbani, 2008:39).

Menurut **Thomas R. Dye** kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa

bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

David Easton mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah alokasi dari nilai-nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, dimana hanya pemerintah yang memiliki hak otoritatif tersebut dan semua yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan merupakan hasil dari nilai otoritatif tersebut.

Merujuk definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa : 1) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, 2) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, 3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak untuk dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah 1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, 2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu : *Regulatory* yaitu mengatur perilaku orang, *Redistributive* yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, *Distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan *Constituent* yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

2.3 Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam kamus besar indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (poerwa darminta, 1999:327). Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus di sertai sarana yang memdukung nantinya akan menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 2012:135).

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu di buat dalam suatu bentuk positif seperti undang – undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau di implementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2012 : 149), Menyatakan bahwa :

Proses implementasi adalah sebagai tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu–individu (atau kelompok–kelompok) pemerintah atau swsta yang diarahkan untuk mencapai tujuan–tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan–keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan merupakan satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam waktu tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (**Bambang Sunggono 1999 : 137**).

2.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam penertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002 : 102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brain W.Hogwood dan Lewis A.Gun, yaitu (**Wahab Solichin, 2012: 167**).:

1. Kondisi eksternal yang di hadapi oleh instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Tak jarang ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Jadi, kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Di suatu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

6. Hubungan ketergantungan kecil.

Persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal (*single agency*), untuk keberhasilan misi yang diembanya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

Pemahaman dan kesepakatan yang menyeluruh mengenai tujuan atau sasaran yang akan dicapai.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

Bahwa dalam menggayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Harus ada komunikasi dan koordinsi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Harus terdapat kondisi ketundukuan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dari siapa pun dalam sistem administrasi itu.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seseorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi itu harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang

dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemetintah dan juga organisasi-organisasi swasta (**Budi Winarno, 2002 : 126-151**)

Menurut teori proses implementasi kebijakan **Van Meter** dan **Horn**, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus didefinisikan dan diukur karena implementasi tadi dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksanaan erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan atau implementasi kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar para pelaksana.

5. Sikap para pelaksanaan (*implementors*).

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksanaan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. (**Wahab Solichin, 2012 : 165**).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditunjukkan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditunjukkan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut **James Anderson**, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
2. adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.

5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (**Bambang Sunggono, 1999 : 144**).

2.5 Faktor penghambat implementasi

Menurut Bambang Sugono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambatan, yaitu :

1. Isi kebijakan

Kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dari kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan sumberdaya manusia.

2. Informasi

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil daripada kebijakan tersebut.

3. Dukungan

Sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi

Yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan – pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1999:149-153).

2.6 Perundang – Undangan

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 perubahan atas Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian:

- a. Bahwa dengan berlakunya system penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut asas otonomi dan tugas pembantuan serta upaya memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigrasi, maka dilakukan penyempurnaan ketentuan penyelenggaraan transmigrasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang – undang tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian.

Pada pasal 13 ayat 1

Huruf a yang di maksud dengan perbekalan adalah bantuan yang di berikan kepada transmigran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di Permukiman Transmigran serta peralatan untuk memulai mengembangkan usaha atau budu daya.

Yang di maksud dengan pengangkutan adalah bantuan yang di berikan kepada Transmigran untuk mengangkut Transmigran dan barang bawaannya dari tempat asal sampai dengan permukiman Tansmigrasi yang mencakup fasilitas angkutan, penumpang, layanan kesehatan, dan pengawalan

Yang di maksud dengan penempatan adalah bantuan yang di berikan kepada transmigrasi di permukiman Transmigrasi berupa penempatan rumah tinggal, kejelasan informasi tentang hak dan kewajiban transmigran, serta bimbingan adaptasi lingkungan dalam rangka mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan baru di Permukiman Transmigrasi.

Huruf b : lahan usahadan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik

Huruf c : yang dimaksud dengan sarana produksi adalah bahan masukan yang digunakan dalam proses produksi usaha tertentu sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan dikawasan transmigrasi. Sarana produksi dalam pengertian ayat ini antara lain : untuk usaha pertanian seperti pupuk, benih, pestisida untuk usaha perikanan seperti kapal dan peralatan tangkap. Untuk peternakan seperti ternak unggas, dan pakan ternak; dan lain-lain

Huruf d : yang dimaksud dengan catuan pangan adalah bantuan yang diberikan kepada transmigran pada jenis Transmigrasi Umum berupa natura dan/atau non-natura untuk meningkatkan biaya hidup agar mereka dapat mulai bekerja/berusaha di Permukiman Transmigrasi.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan keputusan menteri pedayagunaan aparatur negara nomor : Kep.58/M.PAN/6/2004 tentang jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat (PSM) dan angka kredit yang berlaku yaitu:

a. Tugas pokok :

Tugas pokok adalah melaksanakan kegiatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang meliputi penggerakan, publikasi program, penggerakan masyarakat dan evaluasi penggerak masyarakat

b. Fungsi

1. Persiapan penggerak swadaya masyarakat
2. Pelaksanaan penggerakan
3. Pengembanagn propesi
4. Penunjang tugas Penggerak Swadaya Masyarakat.

Dari undang – undang Nomor 29 Tahun 2009 pada Ayat 13 Huruf c tentang yang dimaksud dengan sarana produksi adalah bahan masukan yang digunakan dalam proses produksi usaha tertentu sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan dikawasan transmigrasi. Sarana produksi dalam pengertian ayat ini antara lain : untuk usaha pertanian seperti pupuk, benih,

pestisida untuk usaha perikanan seperti kapal dan peralatan tangkap. Untuk peternakan seperti ternak unggas, dan pakan ternak; dan lain-lain.

Maka terbentuklah program – program UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru yang salah satunya adalah daerah percontohan lahan pertanian yang berada di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru, dimana daerah percontohan ini di kelola secara bersama antara bagian Tata Usaha dan Penggerak Swadaya Masyarakat dan di bantu oleh tenaga Honorer dan di koordinasikan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat.

2.7 Indikator Penelitian

Menurut George C.Edward (Edward III) dalam Budi Winarno(2012:178-205) ada empat faktor atau indikator yang harus di perhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel pening yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif akan terlaksana. Jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga faktor tersebut yaitu :

- a. Transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Kejelasan. Komunikasi yang di terima oleh pelaksanaan kebijakan (*street -level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber-sumber

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi implemenasi kebijakan terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street -level-bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda misalnya : hak untuk mengeluarkan surat pengadilan untuk datang ke pengadilan, mengajukan masalah-masalah ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada para pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, membeli barang-barang dan jasa atau memungut pajak.
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Kecenderungan-kecenderungan

Menurut Edward III dalam Budi Winarno (2012:197) mengumumkan “ kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya

dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. demikian sebaliknya. Jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

4. Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Adapun hubungan antara teori implementasi kebijakan dengan penelitian, ini dilihat dari teori Edward III dalam Reza Herdasari (2010:29) adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomsusikan pada publik.
2. Sumber Daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung dan kecakapan pelaksanaan kebijakan dan implementasi kebijakan.
3. Disposisi, berbicara tentang ketersediaan implemator kebijakan dalam implementasi kebijakan.
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan.

2.8 Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih dari pada itu yaitu tentang syariah yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits.

Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintah ini. Al-Quran dan Hadits telah membicarakan hal itu, semua telah tertuang di dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya.

Muraqabah adalah pengawasan yang sebenarnya. Karena ia merupakan sistem pengawasan dari bagi individu bukan hanya sebatas dalam kaintannya dengan aspek-aspek materi keduniaan belaka, namun jauh menembus batas dan kemampuan dengan nilai-nilai keabadian dan kekuatan yang berada diluar kemanusiaan dan kealaman itu sendiri.

Adapun Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Pengawasan yaitu :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu sekalian*” (QS an-Nisaa’:1).

وكان الله على كل شيء رقيباً

Artinya : “Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu” (QS al-Ahzaab:52).

Pengawasan Allah SWT sangat berbeda dengan pengawasan yang dijalankan oleh umatnya. Sebab secara umum pengawasan tersebut dibagi menjadi dua yaitu : pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Kedua pengawasan tersebut memiliki tata prosedur yang berbeda, namun yang lebih esensial adalah kedua pengawasan tersebut dilakukan oleh manusia dan sangat terbatas oleh waktu.

Jika dibandingkan dengan pengawasan Allah kepada hambanya atau manusia tentu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya setiap gerak gerik, perbuatan pola fikir, tingkah laku akan diawasi oleh Allah SWT karena ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dalam hal ini jika dihubungkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh manusia sangat jauh berbeda karena pengawasan yang dilakukan oleh manusia hanya pada saat bekerja yang dibatasi oleh ruang dan waktu sementara pengawasan yang dilakukan oleh Allah SWT tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahul yaitu *Implementas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Kasus Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)*. bahwa belum terlaksananya PP No.6 Tahun 2009 dengan baik.

Semenjak di canangkanya otonomi daerah melalui undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang sudah diganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang membawa pergeseran paradigma terhadap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan desa. Ini konsekuensi dari sebuah tuntutan kebijakan dan paradigma baru yang harus dipilih.

Berdasarkan undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, di sebutkan bahwa, sebagian karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Hutan dan ekosistem mangrove secara umum menempati habitat pasangan surut dipantai – pantai terlindung di daerah tropis dan subtropis. Habitat yang di tumbuh mangrove kebanyakanya mempunyai kondisi lingkungan khusus seperti panantai – pantai pada teluk yang terlindung, estuary, delta, bagian terlindung dari tanjung, selat yang terlindungi dan tempat – tempat serupa dengan kondisi tanahnya bervariasi antara lumpur, lempung, gambut dan pasir (Purnomo Basuki, 2005 : 1).

Hutan mangrove di kecamatan rupa mengalami kerusakan yang sangat parah, hal ini dapat di lihat dari jumlah hutan mangrove yang semakin berkurang selain itu dapat di lihat banyak terjadi penebangan liar dan pengalihfungsian hutan

mangrove menjadi tempat pemukiman dan areal perkebunan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

2.10 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1 : Kerangka Penelitian

2.11.1 Definisi Konsep

Untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dalam menafsirkan istilah dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan-batasan konsep diantaranya:

- a. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu dalam hal ini adalah Implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh Dinas Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru.

- b. Implementasi atau pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Dinas Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik.
- c. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Dinas Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru.
- d. Sumber Daya yaitu menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh Dinas Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru. Yang dimaksud dapat berupa sumberdaya manusia, dana dan insentif.
- e. Disposisi atau sikap pelaksanaan yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksanaan dalam juridis dimana kebijakan disampaikan.
- f. Srtuktur birokrasi yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan.

Tabel. II.1 Konsep Operasional variabel

Variabel 2	Indikator 3	Subindikator 4
Implementasi Peraturan	1. Komunikasi	a. Mengadakan sosialisai terhadap kebijakan tentang pertanian. b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pertanian. c. Memberikan informasi kepada masyarakat dengan tepat waktu.
	2. Sumber Daya	a. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksanaan kebijakan. b. Menyediakan fasilitas yang diperukan dalam pelaksanaan kebijakan. c. Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan
	3. Kecendrungan	a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan. b. Respon dari para pelaksana terhadap implemenasi kebijakan. c. Memberikan insentif bagi para pelaksana kebijakan.
	4. Struktur Birokrasi	a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan b. Memberikan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi c. Memiliki tanggung jawab untuk bekerja

Sumber : George C.Edward (Edward III) dalam Budi Winarno (2012:206)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif didasarkan pada eksplanasinya. Dimana penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indevenden) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya (**Sugiyono, 2007: 11**).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru. pada Tanggal 18 januari – 27 Maret 2013.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara, pengisian kuesioner. Dalam pengertian lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan mengenai permasalahan di dalam penelitian ini yakni tentang Implementasi Program Percontohan Lahan

Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan :

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.
- b. Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap, dalam skripsi **(Sutar, 2011, 29).**

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya, sehingga lebih informatif untuk digunakan pihak lain. Pada penelitian ini data sekunder yang penulis butuhkan diantaranya Berupa laporan, maupun informasi dari pihak instansi atau pihak yang berhubungan, seperti geografi UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru, percontohan lahan pertanian. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis bisa menggunakan cara, yaitu dengan :

a. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang

ada untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan, dalam skripsi (Sutar,2011).

b. Dokumen

Dokumen merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia yaitu berbentuk surat dan foto. **(Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, 2011)**

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Questioner

Yaitu merupakan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden, sesuatu yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti .

2. Observasi

Yaitu memperoleh data dengan mengamati secara langsung di objek penelitian yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan yang diperoleh dari Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh Dinas UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru. Pengamatan ini penulis lakukan untuk mencari kesesuaian antara data yang diperoleh dari objek penelitian dengan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu tentang tata letak lokasi percontohan lahan pertanian dan pelaksanaannya.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang utama, jenis wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian yang telah dipilih sebelumnya.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk Dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

(Sugiono, 2004 : 90)

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru yang berjumlah 200 Orang sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 67, pengambilan sampel menggunakan metode Slovin.

Besarnya sampel yang akan diambil pada penelitian ini berdasarkan rumus Slovin **(Umar; 2003: 108):**

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} =$$

$$n = \frac{200}{1 + (200)(10)^2}$$

$$n = \frac{200}{1 + (200)(0.01)^2}$$

$$n = \frac{200}{1 + (2,00)}$$

$$= 66,7$$

Jumlah sampel sebanyak 66,7 orang dibulatkan menjadi 67 orang

Dimana :

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi

e = % kelonggaran penelitian

3.6 Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan fenomena keadaan-keadaan yang ditemui dilapangan, di UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru.

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, kemudian penulis akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Seterusnya penulis akan menganalisis data tersebut secara deskriptif kualitatif. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut dengan analisis isi. (Sumadi Suryabrata, 2011:40)

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Provinsi Riau Pekanbaru

Sejarah berdirinya Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dimulai dengan dibangunnya tempat penampungan calon transmigran (Transito) di kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tahun 1986.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan pelatihan ketransmigrasian di Provinsi ini, Transito tersebut dikembangkan menjadi Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans) pada tahun 1992.

Memasuki tahun 2000, terjadi perubahan struktur organisasi dari instansi vertikal menjadi instansi daerah, menjadikan **BALATRANS** lepas dari instansi induk semula (Kantor Wilayah Departemen transmigrasi) dan menjadi unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemenakertrans, sesuai Surat Menpan/No. 134/M.PAN/5/2001 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat di Lingkungan Kemenakertrans*, salah satu UPT-P dari 5 UPT-P yang dibentuk berada di Provinsi Riau. Kelima (5) tempat tersebut adalah Balatrans Pekanbaru (Wilayah Sumatera), Balatrans Yogyakarta (Wilayah Jawa), Balatrans Denpasar (Wilayah Bali, NTB dan NTT), Balatrans Banjarmasin (Wilayah Kalimantan) dan Balatrans Makassar (Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua).

Sejalan dengan perubahan – perubahan upaya penyempurnaan kelembagaan di lingkungan Kemenakertrans,

diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : PER 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mana UPT-P Balatransterdiri dari 1 Esselon III dan 3 Esselon IV yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Kerjasama.

4.2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja

4.2.1 Kedudukan

Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat di bidang Pelatihan Ketransmigrasian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

4.2.2 Tugas

Melaksanakan tugas pelatihan bagi calon transmigran, transmigran, dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi.

4.2.3 Fungsi

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat di bidang pelatihan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan hasil uji coba model pelatihan di bidang pelatihan transmigrasi

- d. Pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta kerjasama kelembagaan di bidang pelatihan transmigrasi;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan transmigrasi;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

4.2.4 Wilayah Kerja

Meliputi 10 Propinsi yang ada di Pulau Sumatera antara lain : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi dan Propinsi Lampung.

4.3 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Provinsi Riau Pekanbaru

VISI :

Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral, memiliki daya saing, maju dan mandiri.

MISI :

1. Meningkatkan kemampuan serta kualitas masyarakat transmigran melalui pelayanan konsultasi dan pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat di bidang pelatihan transmigrasi.
2. Meningkatkan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran serta koordinasi dan kerjasama kelembagaan dengan instansi lintas sektor dalam rangka penyediaan Program dan peningkatan kapasitas kinerja pelatihan transmigrasi.
3. Membina dan menyelenggarakan pelatihan masyarakat yang diarahkan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,

mobilitas penduduk,

perpindahan penduduk dan pemberdayaan kawasan transmigrasi serta

program lintas sektor.

4. Menyusun Sistem Jaringan Kerjasama mekanisme kerja pelatihan masyarakat dengan para stake holder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan (fungsi server)

5.

Melakukan pengendalian penyelenggaraan pelatihan masyarakat transmigrasi

6. Melaksanakan uji coba modul pelatihan transmigrasi

4.4 Uraian Tugas Bagian

Adapun Susunan Kemenakertrans, diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : PER 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mana UPT-P Balatrans terdiri dari 1 Esselon III dan 3 Esselon IV yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Kerjasama adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga balai.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan inventaris kantor; dan
- d. Pelaksanaan urusan kearsipan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha antara lain sebagai berikut :

- a. Menyusun Renstra (periode lima tahun) rencana program kerja tahun dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat) Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan urusan kepegawaian Balatrans;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan tata usaha keuangan dan layanan perpustakaan Balatrans;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan Balatrans;
- f. Mengkoordinir penyusunan kebutuhan Barang Milik Negara dan barang persediaan Balatrans;
- g. Mengelola dan mengatur pendistribusian barang Milik Negara dan barang persediaan Balatrans;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara Balatrans;
- i. Mengatur penyelenggaraan urusan kerumahtangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana Balatrans ;
- j. Menyusun laporan secara berkala kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

- k. Mengkoordinir pelaksanaan promosi/pameran yang diikuti oleh Balatrans

2. Seksi Program dan Evaluasi

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan pengelolaan penyajian data serta informasi;
- c. Pemantauan, evaluasi program dan penyusunan laporan

Uraian Tugas Seksi Program dan Evaluasi antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelaksanaan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan Program Kerja Tahunan (PKT) Balatrans;
- b. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran Balatrans untuk tahun yang akan datang;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat) balatrans berdasarkan DIPA-POK;
- d. Memberikan konsultasi dan informasi kepada Dinas, UPTD, KUPT, tentang pelaksanaan pelatihan ketransmigrasian;

- e. Melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan latihan ketransmigrasian pada UPTD di wilayah kerja Balatrans;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi kegiatan balatrans;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di Balatrans;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan secara berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) kegiatan Balatrans dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama

Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan berbasis masyarakat dan pelaksanaan hasil uji coba pelatihan sertakerjasama kelembagaan, pelayanan konsultasi, dan promosi di bidang pelatihan ketransmigrasian

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelatihan;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan dan kerjasama antar lembaga; dan
- c. Penyiapan bahan administrasi pelatihan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama antar lembaga.

Uraian tugas Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama antara lain sebagai berikut

:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan program Kerja Tahunan (PKT) Balatrans.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat) Balatrans berdasarkan DIPA-POK;
- c. Melaksanakan penyusunan konsep dan kerjasama pelatihan ketransmigrasian;
- d. Melaksanakan pemberdayaan lembaga pelatihan ketransmigrasian di UPTD wilayah kerja Balatrans;
- e. Melaksanakan pelatihan ketransmigrasian di Balatrans dan wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan ketransmigrasian berdasarkan kerjasama dengan dinas, UPTD di wilayah kerja Balatrans;
- g. Menyusun bahanda dalam rangkakerjasama (MOU) antar lembaga; dan
- h. Melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan;

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Identitas responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

Untuk mengetahui tingkat usia responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	15-25	7	10,4
2	26-35	23	34,3
3	36-45	34	50,7
4	di atas 46	3	4,5
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari Tabel V.1 di atas dapat diketahui identitas responden menurut tingkat usia sebanyak 7 orang atau (10,4 %) responden berusia diantara 15-25 tahun, sebanyak 23 orang atau (34,3 %) responden berusia diantara 26-35 tahun, kemudian sebanyak 34 orang atau (50,7 %) responden berusia diantara 36-45 tahun dan sebanyak 3 orang atau (4,5 %) responden berusia di atas 46 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berusia diantara 36 – 45 tahun.

5.1.2 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel V.2 berikut ini :

Tabel V.2 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Perempuan	26	38.8
2	Laki-laki	41	61.2
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari Tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa responden perempuan sebanyak 26 orang atau (38,8%) sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 41 orang atau (61,2 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berjenis kelamin laki-laki.

5.1.3 Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui Tingkat Pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini :

Tabel V.3 : Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	33	49.3
2	SLTP	16	23.9
3	SLTA	18	26.9
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari Tabel V.3 di atas dapat diketahui identitas responden menurut tingkat pendidikan. 33 orang atau (49,3 %) responden berpendidikan SD,

sebanyak 16 orang atau (23,9 %) berpendidikan SLTP sedangkan 18 orang atau (26,9 %) berpendidikan SLTA sederajat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berpendidikan SD.

5.1.4 Identitas Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Untuk mengetahui jenis pekerjaan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini :

Tabel V.4 : Identitas Responden Menurut Jenis Pekerjaan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	3	4,5
2	Wiraswasta	9	13,4
3	Petani	47	70,1
4	Yang lain	8	11,9
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari Tabel V.4 di atas diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 3 orang atau (4,5 %), kemudian responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 9 orang atau (13,4 %), selanjutnya responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 47 orang atau (70,1 %) dan responden yang bekerja lainnya sebanyak 8 orang atau (11,9 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden bekerja sebagai petani.

5.2 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.2.1 Analisis Variabel Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang

mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seseorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi itu harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang komunikasi Dinas Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Terhadap UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	6	9,0
2	Setuju	34	50,7
3	Kurang Setuju	18	26,9
4	Tidak Setuju	9	13,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.5 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru didapati 6 orang responden atau (9,0 %), yang menyatakan sangat

setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang responden atau (50,7 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 18 orang responden atau (26,9 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang responden atau (13,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu mengadakan sosialisai terhadap kebijakan tentang pertanian di desa Okura Kec.Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel V.6 berikut ini :

Tabel V.6 : Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu mengadakan sosialisai terhadap kebijakan tentang pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	4	6,0
2	Setuju	37	55,2
3	Kurang Setuju	15	22,4
4	Tidak Setuju	11	16,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.6 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu mengadakan sosialisai terhadap kebijakan tentang pertanian di desa Okura Kec.Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru didapati 4 orang respoden atau (6,0 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 37 orang responden atau (55,2 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 15 orang

responden atau (22,4 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang responden atau (16,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang UPT-P Balai Latihan Transmigrasi selalu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat akan pentingnya pertanian dapat dilihat dari tabel V.7 berikut ini :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi selalu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat akan pentingnya pertanian.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	11	16,7
2	Setuju	27	40,3
3	Kurang Setuju	17	25,4
4	Tidak Setuju	12	17,9
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.7 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi selalu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat akan pentingnya pertanian didapati 11 orang responden atau (16,7 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang responden atau (40,3 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 17 orang responden atau (25,4 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang responden atau (17,9 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru sudah memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec.Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru sudah memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	17	25,4
2	Setuju	18	26,9
3	Kurang Setuju	21	31,3
4	Tidak Setuju	11	16,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013

Dari tabel V.8 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru sudah memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec.Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru didapati 17 orang respoden atau (25,4 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 18 orang responden atau (31,3 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 21 orang responden atau (31,3 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang responden atau (16,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu tepat waktu dan memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru dapa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9 : Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu tepat waktu dan memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	4	6,0
2	Setuju	26	38,8
3	Kurang Setuju	28	41,8
4	Tidak Setuju	9	13,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.9 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu tepat waktu dan memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru didapati 4 orang responden atau (6,0 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 26 orang responden atau (38,8 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 28 orang responden atau (41,8 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang responden atau (13,4 %).

Sedangkan untuk melihat rekapitulasi hasil jawaban responden terhadap variabel komunikasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Hubungan Komunikasi UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru

No	Pertanyaan	Frekuensi				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru	6	34	18	9	67
		9,0%	50,7%	36,9%	13,4%	100 %
2	UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu mengadakan sosialisai terhadap kebijakan tentang pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru	4	37	15	11	67
		6,0%	55,2%	22,4%	16,4%	100 %
3	UPT-P Balai Latihan Transmigrasi selalu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat akan pentingnya pertanian	11	27	17	12	67
		16,7%	40,3%	25,4%	17,9%	100 %
4	UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru sudah memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru	17	18	21	11	67
		25,4%	26,9%	31,3%	16,4%	100 %
5	UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu tepat waktu dan memberikan informasi mengenai program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru	4	26	28	9	67
		6,0%	38,8%	41,8%	13,4%	100 %
	Jumlah	42	142	99	52	335
	Rata-rata	8,4	28,4	19,8	10,4	67
	Persentase	12,5%	42,4%	29,6%	15,5%	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.10 tentang variabel komunikasi diketahui bahwa Sebanyak 8 orang responden atau (12,5 %) responden menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 28 orang responden atau (42,4 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 20 orang responden atau (29,6 %) dan

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden atau (15,5 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi antara Dinas Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan program Percontohan Lahan Pertanian terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa selama ini komunikasi petugas dengan para anggota Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, baik itu masalah informasi yang berhubungan dengan pelatihan maupun program-program yang akan dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru (Wawancara, 25 April 2013).

5.2.2 Analisis Variabel Sumber Daya

Sumber-sumber daya yang penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel V.11 : Tanggapan Responden mengenai petugas dari UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian sudah mempunyai kualitas yang baik.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	4	6,0
2	Setuju	25	37,3
3	Kurang Setuju	31	46,3
4	Tidak Setuju	7	10,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.11 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa petugas dari UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian sudah mempunyai kualitas yang baik didapati 4 orang responden atau (6,0 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang responden atau (37,3 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 31 orang responden atau (46,3 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang responden atau (10,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang alat mesin pertanian sudah cukup lengkap di desa Okura Kec.Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel V.12 berikut ini :

Tabel V.12 : Tanggapan Responden alat mesin pertanian sudah cukup lengkap di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	7	10,4
2	Setuju	29	43,3
3	Kurang Setuju	23	34,3
4	Tidak Setuju	8	11,9
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.12 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa alat mesin pertanian sudah cukup lengkap di desa Okura Kec.Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru didapati 7 orang responden atau (10,4 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 29 orang responden atau (43,3 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 23 orang responden atau (34,4 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 orang responden atau (11,9 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu memberikan pengarahan dalam penggunaan alat mesin pertanian dapat dilihat dari tabel V.13 berikut ini :

Tabel V.13 : Tanggapan Responden UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu memberikan pengarahan dalam penggunaan alat mesin pertanian.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	3	4,5
2	Setuju	27	40,3
3	Kurang Setuju	26	38,8
4	Tidak Setuju	11	16,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.13 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu memberikan pengarahan dalam penggunaan alat mesin pertanian didapati 3 orang responden atau (4,5 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 27 orang responden atau (40,3 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 26 orang responden atau (38,3 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang responden atau (16,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian sudah berjalan dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian sudah berjalan dengan baik

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	9	13,4
2	Setuju	21	31,3
3	Kurang Setuju	24	35,8
4	Tidak Setuju	13	19,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.14 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian sudah berjalan dengan baik didapati 9 orang responden atau (13,4 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 21 orang responden atau (31,3 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 24 orang responden atau (35,8 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang responden atau (19,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Anggaran yang diberikan melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Anggaran yang diberikan melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	7	10,4
2	Setuju	25	37,3
3	Kurang Setuju	20	29,9
4	Tidak Setuju	15	22,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.15 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Anggaran yang diberikan melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran didapati 7 orang responden atau (10,4 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang responden atau (37,3 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 20 orang responden atau (29,9 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15 orang responden atau (22,4 %).

Sedangkan untuk melihat rekapitulasi hasil jawaban responden terhadap variabel komunikasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Sumber Daya diUPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru

No	Pertanyaan	Frekuensi				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Menurut saya petugas dari UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian sudah mempunyai kualitas yang baik	4	25	31	7	67
		6,0%	37,3%	46,3%	10,4%	100 %
2	Menurut saya alat mesin pertanian sudah cukup lengkap di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru	7	29	23	8	67
		10,4%	43,3%	34,3%	11,9%	100 %
3	UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu memberikan pengarahan dalam penggunaan alat mesin pertanian	3	27	26	11	67
		4,5%	40,3%	38,8%	16,4%	100 %
4	Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian sudah berjalan dengan baik	9	21	25	12	67
		13,4%	31,3%	35,8%	18,4%	100 %
5	Anggaran yang diberikan melalui UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran	7	25	20	15	67
		10,4%	37,3%	29,9%	22,4%	100 %
	Jumlah	30	127	125	53	335
	Rata-rata	6	25,4	25	10,6	67
	Persentase	9,0%	37,9%	37,3%	15,8%	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.16 tentang variabel sumber daya diketahui bahwa Sebanyak 6 orang responden atau (9,0 %) responden menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 26 orang responden atau (38,8 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 24 orang responden atau (35,8 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang responden atau (15,8 %).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan program Percontohan Lahan Pertanian terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas, menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan, meskipun masih banyak kekurangan yang diluar perkiraan (Wawancara, 25 April 2013).

5.2.3 Analisis Variabel Kecendrungan

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang disposisi pada para pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang ditentukan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel V.17 : Tanggapan Responden mengenai para pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang ditentukan.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	12	17,9
2	Setuju	25	37,3
3	Kurang Setuju	17	25,4
4	Tidak Setuju	13	19,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.17 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa para pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang ditentukan didapati 12 orang responden atau (17,9 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang responden atau (37,3 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 17 orang responden atau (25,4 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang responden atau (19,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Para penggerak swadaya masyarakat selalu memberikan motivasi kepada petani dapat dilihat pada tabel V.18 berikut ini :

Tabel V.18 : Tanggapan Responden mengenai Para penggerak swadaya masyarakat selalu memberikan motivasi kepada petani.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	12	17,9
2	Setuju	22	32,8
3	Kurang Setuju	24	35,8
4	Tidak Setuju	9	13,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.18 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Para penggerak swadaya masyarakat selalu memberikan motivasi kepada petani terdapat sebanyak 12 orang responden atau (17,9 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 22 orang responden atau (32,8 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 24 orang responden atau (35,8 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang responden atau (13,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Program percontohan lahan pertanian mendapat tanggapan positif terhadap masyarakat transmigrasi di Desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru.dapat dilihat dari tabel V.19 berikut ini :

Tabel V.19 : Tanggapan Responden mengenai Program percontohan lahan pertanian mendapat tanggapan positif terhadap masyarakat transmigrasi di Desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	4	6,0
2	Setuju	30	44,8
3	Kurang Setuju	28	41,8
4	Tidak Setuju	5	7,5
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.19 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Program percontohan lahan pertanian mendapat tanggapan positif terhadap masyarakat transmigrasi di Desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru diketahui bahwa sebanyak 4 orang responden atau (6,0 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang responden

atau (44,8 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 28 orang responden atau (41,8 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang responden atau (7,5 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang kerjasama antara UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dengan desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru sangat baik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.20 : Tanggapan Responden mengenai kerjasama antara UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dengan desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru sangat baik

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	3	4,5
2	Setuju	24	35,8
3	Kurang Setuju	28	41,8
4	Tidak Setuju	12	17,9
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.20 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa kerjasama antara UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dengan desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Pelalawa sangat baik diketahui sebanyak 3 orang responden atau (4,5 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang responden atau (35,8 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 28 orang responden atau (41,8 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang responden atau (17,9 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu melakukan evaluasi pelatihan pertanian di

desa Okura Kec.Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.21 : Tanggapan Responden mengenai UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu melakukan evaluasi pelatihan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	8	11,9
2	Setuju	20	29,9
3	Kurang Setuju	29	43,3
4	Tidak Setuju	10	14,9
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.21 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu melakukan evaluasi pelatihan pertanian di desa Okura Kec.Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru diketahui bahwa sebanyak 8 orang responden atau (11,9 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 20 orang responden atau (29,9 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 29 orang responden atau (43,3 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden atau (14,9 %).

Sedangkan untuk melihat rekapitulasi hasil jawaban responden terhadap variabel disposisi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.22 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kecendrungan di UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru

No	Pertanyaan	Frekuensi				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Menurut saya para pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang ditentukan	12	25	17	13	67
		17,9%	37,3%	25,4%	19,4%	100 %
2	Para penggerak swadaya masyarakat selalu memberikan motivasi kepada petani	12	22	24	9	67
		17,9%	32,8%	35,8%	13,4%	100 %
3	Program percontohan lahan pertanian mendapat tanggapan positif terhadap masyarakat transmigrasi di Desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru	4	30	28	5	67
		6,0%	44,8%	41,8%	7,5%	100 %
4	Menurut saaya kerjasama antara UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dengan desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Pelalawa sangat baik	3	24	28	12	67
		4,5%	35,%%	41,8%	17,9%	100 %
5	UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru selalu melakukan evaluasi pelatihan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab. Kota Pekanbaru	8	20	29	10	67
		11,9%	29,9%	43,3%	14,9%	100 %
	Jumlah	39	121	126	49	335
	Rata-rata	7,8	24,2	25,2	9,8	67
	Persentase	11,6%	36,1%	37,6%	14,7%	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.22 tentang variabel kecendrungan diketahui bahwa Sebanyak 8 orang responden atau (11,6 %) responden menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 24 orang responden atau (36,1 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 25 orang responden atau (37,6 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden atau (14,6 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi pada Dinas Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai

Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan program Percontohan Lahan Pertanian belum terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa kondisi disposisi Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik, (Wawancara, 25 April 2013).

5.2.4 Analisis Variabel Struktur Organisasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemetintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Untuk mengetahui tanggapan responden apakah UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru telah melakukan pengawasan kepada petani dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel V.23 : Tanggapan Responden mengenai UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru telah melakukan pengawasan kepada petani dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	5	7,5
2	Setuju	22	32,8
3	Kurang Setuju	23	34,3
4	Tidak Setuju	17	25,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.23 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru telah melakukan pengawasan kepada petani dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru diketahui sebanyak 5 orang responden atau (7,5 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 22 orang responden atau (32,8 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 23 orang responden atau (34,3 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17 orang responden atau (25,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden apakah UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan pada petani dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.24 : Tanggapan Responden mengenai UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan pada petani dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	5	7,5
2	Setuju	30	44,8
3	Kurang Setuju	22	32,8
4	Tidak Setuju	10	14,9
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013

Dari tabel V.24 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan pada petani dalam menjalankan program percontohan lahan

pertanianterdapat sebanyak 5 orang respoden atau (7,5 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang responden atau (44,8 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 22 orang responden atau (32,8 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang responden atau (14,9 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden apakah terdapatnya sanksi yang diberikan oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian dapat dilihat daritabel berikut ini :

Tabel V.25 : Tanggapan Responden mengenai Terdapatnya sanksi yang diberikan oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	5	7,5
2	Setuju	28	41,8
3	Kurang Setuju	21	31,3
4	Tidak Setuju	13	19,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.25 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa terdapatnya sanksi yang diberikan oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian diketahui bahwa sebanyak 5 orang respoden atau (7,5 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 28 orang responden atau (41,8 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju

sebanyak 21 orang responden atau (31,3 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang responden atau (19,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden apakah sanksi yang diberikan UPT-P Balai Latihan Transmigrasi apabila terjadi penyimpangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.26 :Tanggapan Responden mengenai sanksi yang diberikan UPT-P Balai Latihan Transmigrasi apabila terjadi penyimpangan.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	10	14,9
2	Setuju	13	19,4
3	Kurang Setuju	33	49,3
4	Tidak Setuju	11	16,4
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.26 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan UPT-P Balai Latihan Transmigrasi apabila terjadi penyimpangan diketahui sebanyak 10 orang responden atau (14,9 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang responden atau (19,4 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 33 orang responden atau (49,3 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang responden atau (16,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden apakah UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di Desa Okura Kecamatan Rumbi Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.27 : Tanggapan Responden mengenai UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Kota Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Sangat Setuju	9	13,4
2	Setuju	23	34,3
3	Kurang Setuju	23	34,3
4	Tidak Setuju	12	17,9
Jumlah		67	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.27 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru diketahui bahwa sebanyak 9 orang responden atau (13,4 %), yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 23 orang responden atau (34,3 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 23 orang responden atau (34,3 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang responden atau (17,9 %).

Sedangkan untuk melihat rekapitulasi hasil jawaban responden terhadap variabel struktur organisasi tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.28 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Struktur Organisasi di UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru

No	Pertanyaan	Frekuensi				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	UPT-P Balaii Latihan Transmigrasi Pekanbaru telah melakukan pengawasan kepada petani dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Pelalawan	5	22	23	17	67
		7,5%	32,8%	34,3%	25,4%	100 %
2	UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan pada petani dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian	5	30	22	10	67
		7,5%	44,8%	32,8%	14,9%	100 %
3	Terdapatnya sanksi yang diberikan oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan program percontohan lahan pertanian	5	28	21	13	67
		7,5%	41,8%	31,3%	19,4%	100 %
4	Menurut saya sanksi yang diberikan UPT-P Balai Latihan Transmigrasi apabila terjadi penyimpangan	10	13	33	11	67
		14,9%	19,4%	49,3%	16,4%	100 %
5	UPT-P Balai Latihan Transmigrasi mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan program percontohan lahan pertanian di desa Okura Kec. Rumbai Pesisir Kab.Pelalawan	9	23	23	12	67
		13,4%	34,3%	34,3%	17,9%	100 %
	Jumlah	34	116	122	63	335
	Rata-rata	6,8	23,2	24,4	12,6	67
	Persentase	10,1%	34,6%	36,4%	18,8%	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.28 tentang variabel struktur organisasi di atas diketahui bahwa Sebanyak 7 orang responden atau (10,1 %) responden menyatakan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 23 orang responden atau (34,6 %) kemudian yang menyatakan kurang setuju sebanyak 24 orang responden atau (36,4 %) dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang responden atau (18,8 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi

struktur organisasi pada Dinas Balai Latihan Transmigrasi UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan program Percontohan Lahan Pertanian belum terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas UPT-P Pekanbaru di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa selama struktur birokrasi mereka sudah baik dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan (Wawancara, 25 April 2013).

Tabel V.29 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Implementasi Program Daerah Percontohan lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Frekuensi				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Hubungan Komunikasi UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru	8,4	28,4	19,8	10,4	67
		12,5%	42,4%	29,6%	15,5%	100 %
2	Hubungan Sumber Daya UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru	6	25,4	25	10,6	67
		9,0%	37,9%	37,3%	15,8%	100 %
3	Hubungan Kecenderungan UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru	7,8	24,2	25,2	9,8	67
		11,6%	36,1%	37,6%	14,7%	100 %
4	Hubungan Struktur Birokrasi UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru	6,8	23,2	24,4	12,6	67
		10,2%	34,6%	36,4%	18,8%	100 %
	Jumlah	29	101	94	43	267
	Rata-rata	7,3	25,3	23,6	10,8	67
	Persentase	10,9%	37,7%	35,2%	16,2%	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari rekapitulasi tabel di atas dapat diketahui Frekuensi option sebagai berikut :

$$A = 29$$

$$B = 101$$

$$C = 94$$

$$D = 43$$

Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$N = Fa + Fb + Fc + Fd$$

$$= 29 + 101 + 94 + 43$$

$$= 267$$

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu :

Option A dengan bobot 4

Option B dengan bobot 3

Option C dengan bobot 2

Option D dengan bobot 1

Dari bobot yang telah diberi nilai di atas, maka dapatlah diperoleh F sebagai berikut :

$$\text{Frekuensi option } A = 29 \times 4 = 116$$

$$\text{Frekuensi option } B = 101 \times 3 = 303$$

$$\text{Frekuensi option } C = 94 \times 2 = 188$$

$$\text{Frekuensi option } D = 43 \times 1 = 43$$

$$\text{Jumlah } F = 650$$

Berdasarkan jumlah yang telah diperoleh di atas maka dapat dicari persentase rata-rata kualitatifnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} P &= \frac{F}{N} \times 100 \div 4 \\ &= \frac{100 \cdot F}{4 \cdot N} \\ &= \frac{100 (F)}{4 (N)} \\ &= \frac{100 \times 650}{4 \times 267} \\ &= \frac{65000}{1068} \\ &= 60,8 \end{aligned}$$

Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh di atas adalah Implementasi Program Dearah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru. Untuk memahami maksimal atau belum maksimalnya Implementasi Program Dearah Percontohan Lahan Pertanian tersebut makan akan diberi ukuran, menurut Suharsimi Ari Kunto sebagai berikut :

Tinggi/Maksimal	: 76-100%
Cukup/Kurang	: 56-75%
Tidak Maksimal/Rendah	: 40-45%
Sangat Tidak Maksimal/Sangat Rendah	: 0-39%

Dari rekapitulasi kuesioner tentang Implementasi Program Dearah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa Implementasi Program Dearah Percontohan Lahan Pertanian dalam kategori yang cukup maksimal, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 60,8 %.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Hasil rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa rata-rata implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru sudah berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa komunitas berjalan dengan baik, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru berjalan dengan baik, kondisi kecenderungan yang terjadi sudah baik dan struktur organisasi UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kabupaten Kota Pekanbaru juga sudah baik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dimasa yang akan datang implementasi Program Daerah Percontohan Lahan Pertanian Oleh UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa

OkuraKecamtanRumbaiPesisirKabupaten Kota Pekanbaru dapat di
pertahankan dan lebih di tingkatkan lagi.

2. Diharapkan bisa menjalin hubungan kerja sama yang baik antara UPT-P
Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru dengan masyarakat Transmigrasi
yang ada.

3. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak khususnya bagi UPT-P

Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Di Desa

OkuraKecamtanRumbaiPesisirKabupaten Kota

Pekanbaru dan bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University press.
- Hessel Nogi, S. Tangkilisan, 2003. *Kebijakan Publik untuk Pimpinan Berwawasan Internasional*. Yogyakarta : Balairung.
- Hidayat, Syarifudin, dkk.. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : CV.
- Keban, Yermis T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Lijan Poltak Sinambela.2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Elex Media Kompetindo.
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. 2011. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Sunggono, Bambang. 1999. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo, Dwi Agus, Mardizal, Peran Pemuda Dalam Ketahanan Nasional, Lembaga Jangka Indonesia, Jakarta: 201

- Syaffie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Syaukani. 2002. *Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta : Mida Pustaka.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Balairung.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Peraturan Perundangan.

Peraturan yang Relevant

Undang-Undang No.29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Penyuluhan budidaya tanaman, tentang Pembinaan dan Peran serta Masyarakat

HERI SETYO BUDI/10875003244 : Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan hutan (Studi Kasus Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis).

Agustino/: Indikator Implementasi Kebijakan

[http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/02/21/pengertian-ilmu-pertanian/tanggal 18 Desember 2012](http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/02/21/pengertian-ilmu-pertanian/tanggal%2018%20Desember%202012)

[http://abuabdilbarr.wordpress.com/2007/06/22/pengemngam-ilmu-ilmu-pertanian/18 Desember 2012](http://abuabdilbarr.wordpress.com/2007/06/22/pengemngam-ilmu-ilmu-pertanian/18%20Desember%202012)